

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PARIGI
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PARIGI**

Jln. Raya Cintaratu, Parigi 46393

Email : kecparigi01@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PARIGI

Jalan Raya Cintaratu, Parigi 46393

e-mail : kecparigi01@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 050/ 23 / Kpts.-Kec/ 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Renja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Renja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
46. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 050/SE. 9 -Bappeda Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Renja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 25 Juli 2023

CAMAT PARIGI



MANA SUKARNA, S.IP

NIP. 19691213 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/ 23 / Kpts.-Kec/ 2023
TANGGAL : 25 Juli 2023

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
 - 1. Kecamatan Parigi
- B. Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 1.4 Review Terhadap RKPD
 - 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parigi Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

CAMAT PARIGI



WANA SUKARNA, S.IP
NIP. 19691213 198910 1 001

KATA PENGANTAR

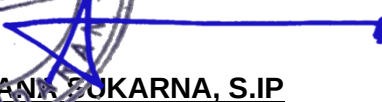
Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk Tahun anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja(Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami mengharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

 CAMAT PARIGI

NANI SUKARNA, S.IP
NIP. 19691213 198910 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN CAMAT	i
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ..	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	
PERANGKAT DAERAH	13
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD	13
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	20
1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	21
1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Kecamatan Parigi Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Kecamatan Parigi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
46. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 050/SE. 9 -Bappeda Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
47. Keputusan Camat Parigi Nomor 050/ 23 / Kpts.-Kec/ 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) untuk Tahun 2024 yang merupakan dokumen awal Perencanaan Kecamatan Parigi untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Parigi secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai

pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Parigi;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Parigi;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja.

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Parigi, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Parigi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kecamatan Parigi									
	Administrasi Pemerintahan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja, dokumen penganggaran kinerja, dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	-	5 Laporan	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	11 Orang	11 Orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah, Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik, Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	16 Laporan	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	-	-	-	-	-
	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	-	25 Paket	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaewai	26 Dokumen	-	26 Dokumen	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas da Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	-	11 Orang	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	-	34 Paket	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	-	5 Paket	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	-	90 Laporan	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%	-	100%	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	-	16 Unit	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	-	7 Unit	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	100%	240 Laporan	240 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	5 Unit	-	-	-	5 Unit	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Laporan	-	11 Laporan	-	-	-	11 Laporan	-

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	-	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakatan	-	5 Lembaga Masyarakatan	-	-	-	5 Lembaga Masyarakatan	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	-	100%	-	-	-	100%	-
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	-	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Meurpakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	-	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Parigi berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2022, sasaran dari capaian kinerja meliputi :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP Kecamatan Parigi	-	-	B	BB	BB	BB	A	BB	A	A	
2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	100	100	100	100	83,69	91,55	92	93	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Parigi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Development Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Parigi harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD

Review terhadap Ranwal RKPD dapat diketahui dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2021 yaitu 78.88%, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan terhadap dapat direalisasikan dengan baik. Dalam menunjang pelaksanaan RKPD menurut identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan setelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31 : Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Parigi.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Kecamatan Parigi

Tabel T-C.31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN PARIGI				2.576.507.676	KECAMATAN PARIGI				1.990.614.456	
	Unsur Kewilayahan				2.576.507.676	Unsur Kewilayahan				1.990.614.456	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	196.152.147	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	17.713.500	
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	184.052.147	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	9.423.500	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	184.052.147	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	9.423.500	
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	12.100.000	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	8.290.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	12.100.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	8.290.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	12.100.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	8.290.000	
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	12.100.000	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	8.290.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Parigi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	10	12.100.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kecamatan Parigi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	10	8.290.000	

			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Perencanaan Pembangunan di Desa		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	12.100.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	8.290.000	
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100	12.100.000	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100	8.290.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	12.100.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	8.290.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	12.100.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	11.028.000	
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	12.100.000	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	11.028.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10	12.100.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10	11.028.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	67.760.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	56.801.175	
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	100	67.760.000	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	100	56.801.175	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	12.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	8.290.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	12.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	8.290.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	43.560.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	40.221.175	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	2.276.295.529	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	1.888.491.781	
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%		
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%		
			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100	55.986.700	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100	36.946.400	
			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100		
			Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	48.726.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	31.546.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	900.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1.210.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	900.000	

	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	1.569.298.989	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	1.569.298.989	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Parigi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.518.152.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Parigi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.361.583.262	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	48.726.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	29.704.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	900.000	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100	49.936.700	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100	30.437.992	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	1.210.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	900.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61	48.726.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61	29.537.992	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	59.943.200	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	55.924.214	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11	11.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11	10.616.214	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	27.733.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	24.210.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	1.210.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	1.098.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Parigi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Parigi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	20.000.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	87.499.940	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	86.051.809	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	3.872.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	3.688.779	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	42.350.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	42.107.360	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	7.260.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	7.207.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	4.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Parigi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	3.913.620	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	3.025.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2.989.550	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	26.152.940	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	26.145.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	263.955.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	132.865.348	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240	4.235.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	36.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	28.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	223.420.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Parigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	100.865.348	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	105.875.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	78.497.270	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Parigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	78.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Parigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	52.379.840	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	24.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	23.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	3.025.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	3.017.430	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	83.800.000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	74.681.086	

						PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	25.500.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Parigi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	24.755.337	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	44.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	38.845.180	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	14.300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Parigi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	11.080.569	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Parigi tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Parigi				Tabel T-C.32	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Ranwal RKPD, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Parigi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Visi & Misi Bupati Pangandaran 2021-2026

Visi :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Misi :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan
3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

1. Kolaborasi membangun desa.
2. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah;
3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Pariwisata
4. Optimalisasi Sektor Bkonomi Unggulan, UMKM, IKM, Koperasi dan Kualitas Tenaga Kerja
5. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah, Sistem Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Pendidikan, Keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga
6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
8. Pemekaran Wilayah Pemerintahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN PARIGI

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Parigi mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif

Sasaran : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, Maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- 2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- 3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

- 4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah

1. *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. *Administrasi Keuangan*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
- a. *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**
- a. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**
- a. *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**
- a. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***
- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**
- a. *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Parigi

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PARIGIKAB. PANGANDARAN
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasio nal	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN PARIGI						1.990.614.456						2.643.688.444		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.990.614.456							2.643.688.444	
	7	01				KECAMATAN						1.990.614.456							2.643.688.444	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	1.888.491.781						100%	2.488.275.082	
	7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%			100 %	36.946.400			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	61.585.370	
	7	01	01	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	31.546.400	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53.599.370	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	900.000	Kab. Pangandaran,	PENDAPATA N ASLI	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI

						Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Parigi, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Pemilu				
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%		100 %	1.393.087.662			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	1.726.228.888	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.361.583.262	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.669.967.518	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	29.704.400	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53.599.370	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%			100 %	30.437.992			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	54.930.370	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	900.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				61 Laporan	29.537.992	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53.599.370	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	55.924.214			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	62.837.520	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	10.616.214	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11.000.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	24.210.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30.506.520	KECAMATAN PARIGI

	7	01	01	2.0 5	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1.098.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.331.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20.000.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		20.000.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	86.051.809			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	96.249.934	
	7	01	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.688.779	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4.259.200	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	42.107.360	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		46.585.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.207.500	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7.986.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.913.620	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5.324.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 6	00 07	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.989.550	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3.327.500	KECAMATAN PARIGI

	7	01	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	26.145.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		28.768.234	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	74.681.086			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	89.630.000	
	7	01	01	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	24.755.337	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25.500.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	38.845.180	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		48.400.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 7	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.080.569	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15.730.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%			100 %	132.865.348			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	280.350.500	
	7	01	01	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	4.000.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4.658.500	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	28.000.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39.930.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.865.348	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		235.762.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%			100 %	78.497.270			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	116.462.500	
	7	01	01	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	52.379.840	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		86.515.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	23.100.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26.620.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3.017.430	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3.327.500	KECAMATAN PARIGI
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%			100 %	17.713.500						100% 100%	40.947.362	
	7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100% 100%			100 %	9.423.500			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	27.637.362	
	7	01	02	2.0 1	00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	9.423.500	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27.637.362	KECAMATAN PARIGI
	7	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja	100% 100%			100 %	8.290.000			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	13.310.000	

						Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												
	7	01	02	2.0 2	00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	8.290.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.310.000	KECAMATAN PARIGI
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%		100 %	8.290.000					100% 100%	13.310.000		
	7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%1 00%		100 %	8.290.000			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	13.310.000	
	7	01	03	2.0 1	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10 Lembaga Kemasya katan	8.290.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.310.000	KECAMATAN PARIGI
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100% 100%		100 %	8.290.000					100% 100%	13.310.000		
	7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100%		100 %	8.290.000			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	13.310.000	
	7	01	04	2.0 1	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			10 Laporan	8.290.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.310.000	KECAMATAN PARIGI
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%		100 %	11.028.000					100% 100%	13.310.000		
	7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100% 100%		100 %	11.028.000			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	13.310.000	
	7	01	05	2.0 1	00 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													

							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	11.028.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.310.000	KECAMATAN PARIGI
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%			100 %	56.801.175						100% 100%	74.536.000	
	7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	100% 100%			100 %	56.801.175			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	74.536.000	
	7	01	06	2.0 1	00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	8.290.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.310.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	06	2.0 1	00 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	40.221.175	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		47.916.000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	06	2.0 1	00 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	8.290.000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.310.000	KECAMATAN PARIGI
	J U M L A H											1.990.614.456							2.643.688.444	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Parigi Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatannya di jelaskan dalam RKA Kecamatan Parigi Tahun 2024 adalah sebagai berikut

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 1.888.491.781,-

a. *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. *Administrasi Keuangan*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 17.713.500,-

c. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 8.290.000,-

c. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 8.290.000,-

b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar Rp. 11.028.000,-

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 56.801.175,-

b. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Parigi Tahun 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Parigi Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan pembangunan. Rencana Kerja ini akan selalu dievaluasi supaya diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/ Kegiatan di masa yang akan datang dan pada akhirnya dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya Rencana Kerja ini tidak mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran agar pendayaguna Aparatur Sipil Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat mewujudkan Kecamatan Parigi yang terdepan dalam pertanian, agribisnis dan peningkatan destinasi wisata kultural dengan tetap mempertahankan agama serta budaya lokal sebagai pandangan hidup di tahun 2026, sebagai daya dukung visi Kabupaten Pangandaran untuk **“MEWUJUDKAN KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**.

Parigi, 25 Juli 2023
CAMAT PARIGI



NATA SUKARNA, S.IP
NIP. 19691213 198910 1 001